



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA
KERJA (RENJA)**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Sunan Muria No. 9 Kode Pos 59313 Kudus

Telp. (0291) 438713

E-mail : koinfo@kuduskab.go.id

KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2025 disusun sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2025 dilakukan dengan berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang disertai dengan proses koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan yang lain.

Diharapkan dengan Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2025, dapat mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan di wilayah Kabupaten Kudus.

Kudus, 5 Juni 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19740919 199303 2 002

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi.....	3
Daftar Tabel.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Maksud dan Tujuan.....	6
1.3 Dasar Pertimbangan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah.....	6
1.4 Landasan Hukum	7
1.5 Sistematika	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2024 s/d Triwulan I	11
2.3 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	20
BAB III RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.....	25
BAB IV PENUTUP.....	38
.	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika 10
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Urusan Statistik..... 11
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Urusan Persandian..... 10
Tabel 2.4	Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan I..... 14
	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah..... 21
Tabel 2.5	Daerah..... 21
Tabel 3.1	Rekapitulasi Rancangan Akhir Perubahan Anggaran Renja Tahun 2025 26
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika..... 29
Tabel 3.3	Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Kudus Tahun 2024..... 30

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja OPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas, dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
3. Pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
4. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam perubahan RKPD.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan perubahan yang merupakan hasil evaluasi pada pencapaian pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Dokumen ini diperlukan untuk mengakselerasi capaian sasaran pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika selama tahun 2025 dalam bentuk penentuan target kinerja, kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Rencana Kerja Rancangan Akhir Perubahan adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Rancangan Akhir Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 adalah :

- a. Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta program kegiatan yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2025.
- b. Sinkronisasi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD.
- c. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas/ mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran.
- d. Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.3. Dasar Pertimbangan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025, dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan yang belum sesuai dengan perkembangan. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan InforMatika Kabupaten Kudus didasakan pada pertimbangan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya penyesuaian pagu gaji Pegawai Negeri Sipl (PNS) sesuai dengan jumlah PNS pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus;

2. Pembuatan aplikasi layanan daerah berbasis IOS (I Phone) saat ini yang segera untuk pengembangan aplikasi Kudus Sehat sehingga diperlukan alat untuk pengembangan aplikasi tersebut.
3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur SPBE maka perlu pemasangan jaringan Fiber Optic diseluruh wilayah Kabupaten kudus sehingga diperlukan dokumen perencanaan pemasangan jaringan fiber optic.
4. Perumbuhan dan perkembangan pasar menyebabkan sebagian barang dengan spesifikasi tertentu sudah tidak diproduksi lagi dan mengalami kenaikan harga di pasaran sehingga perlu perubahan barang yang masih tersedia di pasar.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 62);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 10).
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2025 tanggal 28 Mei 2025 tentang Perubahan RKPД Kabupaten Kudus Tahun 2025

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat/ menjelaskan Latar Belakang, maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan.

**BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRWULAN I
TAHUN 2025**

Bab ini memuat evaluasi Renja hingga Triwulan I Tahun 2025.

**BAB III RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA
DAN PENDANAAN**

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025Bab ini memuat usulan dan revisi program, kegiatan dan sub kegiatan perubahan.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran atau hal penting yang perlu mendapat perhatian penting dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus melaksanakan 3 (tiga) urusan pemerintah daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Dalam tugas pokok dan fungsi sesuai urusan tersebut telah ditetapkan indikator untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja. Indikator indikator yang mengacu pada sasaran RPD tahun 2024-2026 dan analisis pencapaian sampai dengan triwulan I dari Dinas Komunikasi dan Informatika lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

a. Urusan Komunikasi dan Informatika

Kinerja penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPD 2024- 2026	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	PD Penang- gung Jawab
							Target	Realisasi sd TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1.	Nilai Survey Kepuasan Publik	84 Nilai	N/A	N/A	N/A	83.7	83 Nilai	82,11	98,11%		Dinas Kominfo
2.	Nilai SPBE domain tata kelola	3,5 Nilai	2,29 nilai	2,43 indeks	1.9 indeks	4,4 indeks	4.4 Nilai	3.9	88,63%		Dinas Komin- fo
Rata-rata capaian kinerja (%)											
Predikat kinerja											

Keterangan :

: Terpenuhi lebih dari 100% : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) : Perlu Upaya Keras (< 20%)
Sangat Tinggi $X \geq 46$; Tinggi $45 \geq X > 38$; Sedang $37 \geq X > 33$; Rendah $32 \geq X > 26$; Sangat Rendah $X \leq 25$

Pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada indikator Nilai Survey Kepuasan Publik sudah mencapai 98,11% dan Nilai SPBE domain tata kelola sudah mencapai 88,63%. Untuk itu, perlu dirumuskan langkah-langkah strategis guna mencapai target 100% yang telah ditetapkan

sebelumnya. Adapun langkah strategis tersebut adalah:

- Memobilisasi seluruh sumber daya yang dimiliki OPD untuk segera menyelesaikan program kegiatan yang sudah dan masih berjalan sampai triwulan I agar beban kerja dari target yang ada di triwulan berikutnya maupun program kegiatan triwulan sebelumnya yang belum terlaksana dapat di-manage dengan baik;
- Konsolidasi internal, yakni dengan mengadakan evaluasi internal untuk mendeteksi permasalahan dan melihat program dan kegiatan mana saja yang capaiannya belum sesuai dengan yang diharapkan sehingga diperlukan perhatian khusus guna menjamin keberhasilan realisasi program kegiatan tersebut;
- Melakukan perencanaan ulang bagi program kegiatan yang belum terlaksana (baik yang dijadwalkan pada triwulan I dan II, mau pun yang akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV), khususnya terkait dengan penganggaran pada anggaran perubahan tahun ini;
- Melanjutkan koordinasi dengan para stakeholder, terkait dengan program kegiatan yang perlu terlaksana untuk memastikan program kegiatan tersebut nantinya dapat terealisasi dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya;
- Melakukan evaluasi rutin terkait progres atas realisasi program kegiatan tersebut guna mengantisipasi adanya hambatan yang dapat timbul dalam pelaksanaannya.
- Mengembangkan aplikasi Kudus Sehat berbasis IOS untuk meningkatkan pelayanan pengaduan.

b. Urusan Statistik

Kinerja penyelenggaraan Urusan Statistik ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada table berikut:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Urusan Statistik

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPD 2024- 2026	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XIV	STATISTIK										
1.	Indeks Pembangunan Statistik	3 Indeks	N/A	N/A	N/A	2,88 indeks	2,9 indeks	2,88 indeks	99,31%	▶	Dinas Kominfo
Rata-rata capaian kinerja (%)											
Predikat kinerja											

Keterangan :

● : Tercapai lebih dari 100% ▶ : Akan tercapai (20 % ≤ 99%) ▼ : Perlu Upaya Keras (< 20%)
Sangat Tinggi $X \geq 46$; Tinggi $45 \geq X > 38$; Sedang $37 \geq X > 33$; Rendah $32 \geq X > 26$; Sangat Rendah $X \leq 25$

Dari tabel di atas dapat dilihat realisasi target sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sudah 99,31%. Untuk itu, perlu dirumuskan langkah-langkah strategis guna mencapai target 100% yang telah ditetapkan sebelumnya.

Upaya yang akan dilakukan yaitu Menyelenggarakan Forum Satu Data Kabupaten Kudus sekaligus mensosialisasikan Peraturan Bupati Kudus nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kudus, yang di dalamnya disebutkan bahwa setiap Perangkat adalah Produsen Data merangkap sebagai walidata pendukung. Tugas Produsen data adalah menghasilkan data sesuai dengan Prinsip Satu Data Kab. Kudus, serta menyampaikan data kepala walidata (Dinas Kominfo) beserta metadata yang melekat pada Data tersebut secara periodik dan berkala sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan walidata pendukung adalah sekretaris/pejabat administrator yang membidangi kesekretariatan pada perangkat daerah, di mana salah satu tugasnya adalah memeriksa kesesuaian dan kelengkapan data yang disampaikan oleh produsen data. Forum Satu Data Kabupaten Kudus rencananya akan dilaksanakan pada Triwulan III.




b. Urusan Persandian

Kinerja penyelenggaraan urusan Persandian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Urusan Persandian

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPD 2024- 2026	Reali sasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisa si 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD 2025 sd TW I (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XV	PERSANDIA N										
1.	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	300 indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	340 indeks	499 indeks	120%		Dinas Kominfo
Rata-rata capaian kinerja (%)											
Predikat kinerja											

Keterangan :

 : Tercapai lebih dari 100%  : Akan tercapai (20 % ≤ 99%)  : Perlu Upaya Keras (< 20%)
Sangat Tinggi $X \geq 46$; Tinggi $45 \geq X > 38$; Sedang $37 \geq X > 33$; Rendah $32 \geq X > 26$; Sangat Rendah $X \leq 25$

Faktor pendorong tercapai lebih dari 100% dikarenakan dengan memberikan pelatihan kepada personal yang sudah ada terkait keamanan informasi, serta membentuk tim CSIRT (*Computer Security Incident Response*

Team) sebagai Upaya tanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber. Serta akan dibangun SOC (Security Operation Center yang berfungsi untuk memantau, mendeteksi, menganalisis, dan merespon insiden keamanan siber. Sehingga jika suatu terpantau trafik penggunaan system yang tidak semestinya, maka dapat ditindaklanjuti secepat mungkin.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 sampai dengan triwulan I ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang belum berhasil diwujudkan sampai dengan Triwulan I. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, maka dalam pelaksanaan diperlukan indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian serta keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang tertuang dalam RKPD dengan realisasi masing-masing keluaran kegiatan. Evaluasi program dan hasil kegiatan berdasarkan realisasi capaian kegiatan sampai dengan triwulan I dapat dilihat pada tabel 2.4

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERIODE PELAKSANAAN : 2025

TRIWULAN I

(* dalam ribu)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2025 (%)		Ket	
					I		II		III		IV			9=5+6+7+8			10=9/4*100
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			9.539.133		918.431		0		0		0		918.431		9,63	
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	44 nilai		39		0		0		0		39		88,64		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14.510		3.180		0		0		0		3.180		21,92	
		Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah	100 persen		25		0		0		0		25		25		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.698		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen		2		0		0		0		2		15,38		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			742		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan		2		0		0		0		2		20		
X.XX.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6.070		3.180		0		0		0		3.180		52,39	
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1		0		0		0		1		100		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.872.122		554.834		0		0		0		554.834		11,39	
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	100 persen		25		0		0		0		25		25		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.788.984		553.811		0		0		0		553.811		11,56	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan		28		0		0		0		28		25		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			72.900		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD			10.238		1.023		0		0		0		1.023		9,99	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		3		0		0		0		3		25		
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6.000		0		0		0		0		0		0	
		Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	100 persen		0		0		0		0		0		0		
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			6.000		0		0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		0		0		0		0		0		0		

X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			492.341		134.467	0	0	0		134.467		27,31	
		Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	12 Persen		0	0	0	0	0		0		0	
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			67.341		0	0	0	0		0		0	Belum ada yang mengikuti Pelatihan atau Bimbingan Teknis dari penyelenggara kegiatan dan proses efisiensi anggaran
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		0	0	0	0	0		0		0	
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			425.000		134.467	0	0	0		134.467		31,64	Realisasi anggaran yang sudah terlaksana dari bulan januari s.d. bulan maret (Triwulan I) di Belanja Jasa Iklan Media Cetak Regional dan rencana pelaksanaan Sosialisasi Tatap Muka gempur rokok ilegal pada Triwulan II
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500 Orang		0	0	0	0	0		0		0	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			265.461		11.782	0	0	0		11.782		4,44	
		Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	100 persen		25	0	0	0	0		25		25	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			62.601		2.309	0	0	0		2.309		3,69	Proses efisiensi anggaran
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket		4	0	0	0	0		4		10	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			33.004		2.642	0	0	0		2.642		8	proses efisiensi anggaran
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		0,17	0	0	0	0		0,17		17	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			18.050		0	0	0	0		0		0	proses efisiensi anggaran
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		1	0	0	0	0		1		14,29	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			10.800		2.010	0	0	0		2.010		18,61	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen		3	0	0	0	0		3		25	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			141.006		4.821	0	0	0		4.821		3,42	proses efisiensi anggaran
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		3	0	0	0	0		3		25	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.762		0	0	0	0		0		0	
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 persen		0	0	0	0	0		0		0	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			7.594		0	0	0	0		0		0	proses efisiensi anggaran
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		0	0	0	0	0		0		0	
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			93.168		0	0	0	0		0		0	proses efisiensi anggaran
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		0	0	0	0	0		0		0	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.522.076		189.994	0	0	0		189.994		5,39	
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	100 persen		25	0	0	0	0		25		25	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.000		43	0	0	0		43		1,06	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		3	0	0	0	0		3		25	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.842.560		71.337	0	0	0		71.337		2,51	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3	0	0	0	0		3		25	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			675.516		118.615	0	0	0		118.615		17,56	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3	0	0	0	0		3		25	

X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			265.861		24.174	0	0	0	0	24.174		9,09	
		Persentase BMD dalam kondisi baik	100 persen		0	0	0	0	0	0	0		0	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			231.395		23.364	0	0	0	0	23.364		10,1	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		2	0	0	0	0	0	2		16,67	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			34.466		810	0	0	0	0	810		2,35	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		3	0	0	0	0	0	3		6	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			9.168.831		2.731.668	0	0	0	0	2.731.668		29,79	
		Nilai Survey Kepuasan Publik	83 nilai		82,11	0	0	0	0	0	82,11		98,93	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			9.168.831		2.731.668	0	0	0	0	2.731.668		29,79	
		Persentase respon masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan	100 persen		25	0	0	0	0	0	25		25	
2.16.02.2.01.14	Relasi Media			197.122		0	0	0	0	0	0		0	Sesuai rencana awal, pelaksanaan sub kegiatan Relasi Media akan dilaksanakan pada Triwulan I. Meskipun begitu, pelaksanaan masih menunggu perubahan kebijakan efisiensi anggaran
		Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	2 Laporan		0	0	0	0	0	0	0		0	
2.16.02.2.01.15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat			56.100		0	0	0	0	0	0		0	Sesuai rencana awal, pelaksanaan sub kegiatan Kemitraan dengan Komunitas Informasi Masyarakat dijadwalkan pada Triwulan I dan Triwulan II. Meski begitu, sampai saat ini pelaksanaannya masih menunggu kebijakan terbaru terkait efisiensi anggaran
		Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas		0	0	0	0	0	0	0		0	
2.16.02.2.01.17	Pelayanan Informasi Publik			55.874		2.926	0	0	0	0	2.926		5,24	
		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	25 Permohonan		3	0	0	0	0	0	3		12	
2.16.02.2.01.19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik			190.331		400	0	0	0	0	400		0,21	Pelaksanaan sub kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik telah memasuki tahap koordinasi dengan rekanan, dengan mempertimbangkan proses efisiensi anggaran
		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	52 Rekomendasi		0	0	0	0	0	0	0		0	
2.16.02.2.01.20	Diseminasi Informasi			8.159.138		2.655.042	0	0	0	0	2.655.042		32,54	
		Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100 Persentase		18	0	0	0	0	0	18		18	
2.16.02.2.01.21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			510.266		73.300	0	0	0	0	73.300		14,37	
		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/ juknis	2 Media		1	0	0	0	0	0	1		50	

2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		835.473	312.099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312.099	37,36	
		Nilai SPBE domain tata kelola	4,4 nilai	3,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,9	88,64	
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		835.473	312.099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312.099	37,36	
		Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data	96 Aplikasi	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	100	
2.16.03.2.02.15	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda		11.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.16.03.2.02.16	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah		307.737	302.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302.253	98,22	Progres dokumen sudah sampai 50%
		Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.16.03.2.02.20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		9.980	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	4,21	
		Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50	
2.16.03.2.02.21	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		19.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.16.03.2.02.23	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas		9.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	41 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.16.03.2.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		470.607	9.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.426	2	
		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/ Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	3 Perangkat Daerah	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33,33	
2.16.03.2.02.26	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo		5.956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		131.770	5.429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.429	4,12	
		Indeks Pembangunan Statistik	2,9 indeks	2,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,88	99,31	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		131.770	5.429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.429	4,12	
		Persentase ketercukupan data statistik sektoral	100 persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.20.02.2.01.07	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		47.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	180 Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.20.02.2.01.08	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional		34.992	1.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.890	5,4	
		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/ atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	
2.20.02.2.01.10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia		24.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	5 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.20.02.2.01.11	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar		24.797	3.539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.539	14,27	
		Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	3 Dokumen	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	66,67	

2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			107.791		420	0	0	0	0	420		0,39	
		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	340 indeks		499		0	0	0	0	499		120	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			107.791		420	0	0	0	0	420		0,39	
		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian	56 Persen		15		0	0	0	0	15		26,79	
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			88.097		0	0	0	0	0	0		0	Realisasi dokumen berupa Peraturan Bupati, di mana dalam penyusunannya tidak diperlukan anggaran
		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen		1		0	0	0	0	1		100	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			19.694		420	0	0	0	0	420		2,13	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan		0		0	0	0	0	0		0	
JUMLAH				19.782.998		3.968.046					3.968.046			
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)												46,15	20,06	
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

-Pada sub kegiatan Diseminasi Informasi, kerja sama dengan rekan media yang telah terjalin lama memudahkan Diskominfo dalam realisasi kegiatan; -Pada sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi publik, pelaksanaan dan realisasinya didukung oleh SDM yang andal dan terlatih; -Pada sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik, koordinasi antar OPD dan lembaga/instansi terkait menjadi pendorong keberhasilan di awal tahun; - Kemudahan dalam berkoordinasi dengan instansi vertikal yang membidangi urusan persandian -Tersedianya regulasi dari pusat yang mendukung pelaksanaan beberapa kegiatan di pemerintah daerah

Dari Tabel 2.4 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sampai dengan Triwulan I yaitu 120% dengan predikat sangat tinggi . akan tetapi masih ada beberapa kegiatan yang capaian targetnya masih 0%, antara lain sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pada kegiatan :

- a. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0%;
- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0%;
- c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0%;
- d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0%;

Faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya capaian yang masih rendah antara lain sebagai berikut :

- a. Pada kegiatan Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dikarenakan pelaksanaan pada Bulan April/ Triwulan II.
- b. Pada kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah dikarenakan pelaksanaan diklat teknis rata rata pada Bulan September/ Triwulan III.
- c. Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dikarenakan masih dalam proses efisiensi Anggaran
- d. Pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Karena Keegiatannya sudah berjalan tetapi data realisasi belum muncul;

2.3 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, maka masalah pokok, masalah dan akar masalah yang dihadapi dalam pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan tugas dan fungsi dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	PERMASALAHAN			
	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	ISU STRATEGIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja pemerintahan	koordinasi antar perangkat daerah dan stakeholder belum optimal	belum optimalnya tata kelola pemerintahan
			Belum sinkronnya arsitektur daerah dengan arsitektur SPBE Nasional	
			belum optimalnya pengelolaan TIK pendukung SPBE	
			belum terintegrasinya aplikasi informatika dalam penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik	
		Belum optimalnya penyelenggaraan satu data Indonesia	Belum optimalnya kualitas ketersediaan Data Statistik Sektoral	
Tingginya resiko keamanan informasi pemerintah daerah	Kapasitas pegelola keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah belum optimal			
	Belum adanya sistem kerja/ kerangka kerja keamanan informasi terstandar			

2	Keterbukaan informasi publik belum optimal	belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	belum efektifnya penerapan standar kerja baku pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi masyarakat	Belum optimalnya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik
			belum optimalnya pengelolaan sumberdaya komunikasi publik	
			belum optimalnya penyebarluasan informasi dan komunikasi publik	
3	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja PD	Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya di tingkat PD	Belum optimalnya pengelolaan SDM	Birokrasi yang dinamis dan berintegritas
Belum optimalnya pengelolaan sarpras				
Belum optimalnya pengelolaan keuangan				
Belum optimalnya penyusunan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi prosedur kerja yang terstandar				

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 fokus pada program-program kerja untuk mendukung percepatan transformasi digital nasional. Untuk mewujudkan cita-cita bersama menjadi Indonesia Digital yang maju, hilirisasi pada semua sektor perlu dikawal dan dilaksanakan secara simultan. Dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika tentu tidak bisa berjalan sendiri. Pergerakan harus dilakukan bersama antar seluruh perangkat pemerintahan, lapisan masyarakat, dan pelaku usaha untuk mewujudkan transformasi digital Indonesia yang sukses. Melihat alasan tersebut, Pemerintah Daerah diharuskan berperan aktif guna mewujudkan percepatan transformasi digital dikarenakan Pemerintah Daerah berhadapan langsung dengan masyarakat. Transformasi Digital meliputi :

1. Perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital ;
2. Roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis ;
3. Percepatan integrasi PDN ;
4. Penyiapan kebutuhan SDM talenta digital ;
5. Percepatan penerbitan segala regulasi .

Tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan konkuren bidang Komunikasi dan Informatika, meliputi 2 sub urusan yaitu :

- a. Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik
- b. Sub Urusan Aplikasi Informatika

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi komunikasi publik meliputi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang informasi komunikasi publik;
- b. monitoring opini dan aspirasi publik;
- c. monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
- d. pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik;
- e. pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- f. pelayanan Informasi Publik;
- g. layanan hubungan media;
- h. kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- i. manajemen komunikasi krisis;
- j. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dan

- k. dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan aplikasi informatika meliputi :

- a. rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
- b. Nama Domain;
- c. Pusat Data;
- d. sistem Jaringan Intra Pemerintah daerah;
- e. sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
- f. keamanan informasi;
- g. data dan Informasi Elektronik;
- h. aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
- i. sistem penghubung layanan pemerintah;
- j. ekosistem provinsi cerdas dan kota cerdas;
- k. sumber daya Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah; dan
- l. Government Chief Information Officer (GCIO).

Dengan demikian, hal ini menjadi tugas bagi Dinas Kominfo untuk mampu membangun dan mengembangkan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka memberikan layanan pemerintahan berbasis elektronik. Semakin pesat pertambahan jumlah pengguna internet berdampak negatif terhadap munculnya kejahatan cyber. Oleh sebab itu, pemerintah daerah dituntut keras untuk mampu menguatkan keamanan informasi Pemerintah Daerah dari kejahatan cyber.

Peningkatan pengguna internet juga berdampak pada kecepatan dan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi. Monitoring opini dan aspirasi publik harus dikuatkan guna menyaring berita - berita hoaks yang tersebar di masyarakat dan menguatkan berita-berita benar ke masyarakat.

BAB III

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat daerah dilakukan karena adanya perubahan RKPD, untuk mengakomodir dinamika perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan.

Uraian Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disajikan dalam Bab IV ini adalah bersifat menyeluruh, yang didanai oleh APBD perubahan Kabupaten Kudus tahun 2025. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2025 direncanakan antara lain untuk penyesuaian gaji PNS, Penyesuaian anggaran karena kenaikan harga surat kabar, Hibah Camera, Pembelian I Phone, Apple Macbook Pro guna pembuatan aplikasi layanan daerah berbasis IOS (I Phone) saat ini yang segera untuk pengembangan aplikasi Kudus Sehat, Langganan Lisensi Office dan kekurangan pembayaran internet, Kekurangan atas kenaikan honor, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Kontrak. Pengurangan anggaran karena kelebihan jumlah unit roda empat, Kekurangan servis/perbaikan laptop, Pengurangan belanja iklan, Pembelian kabel FO 24 core 300 meter, Jasa splicing (perangkat outdoor) Fiber Optic.

Secara rincian perubahan target kinerja dan penganggaran dalam Perubahan Rencana Kerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rekapitulasi Perubahan Anggaran
Renja Tahun 2025

No	Program	RKPD Awal (Rp)	APBD (Rp)	RKPD Perubahan (Rp)	Alasan Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	9.633.960.000	9.539.133.000	9.212.382.500	<ul style="list-style-type: none"> - Penyesuaian gaji PNS - Penyesuaian anggaran karena kenaikan harga surat kabar - Hibah Camera, Pembelian I Phone dan Apple Macbook Pro guna pembuatan aplikasi layanan daerah berbasis IOS (I Phone) saat ini yang segera untuk pengembangan aplikasi Kudus Sehat - Langganan Lisensi Office dan kekurangan pembayaran internet - Kekurangan atas kenaikan honor, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Kontrak - Pengurangan anggaran karena kelebihan jumlah unit roda empat - Kekurangan servis/perbaikan laptop
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	5.038.344.000	9.168.831.000	7.325.658.000	- Pengurangan belanja iklan
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	642.724.100	835.473.100	810.673.800	Pembelian kabel FO 24 core 300 meter, Jasa splicing (perangkat outdoor) Fiber Optic
4	Program Penyelenggaraan statistik sektoral	131.770.000	131.770.000	64.931.000	-Tidak ada penyesuaian, tambahan ataupun pengurangan anggaran
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	57.791.000	107.791.000	78.445.000	Tidak ada penyesuaian, tambahan ataupun pengurangan anggaran
	JUMLAH	15.504.589.100	19.782.998.100	17.492.090.300	

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan anggaran semula Rp. 9.539.133.000 menjadi Rp. 9.212.382.500, dengan rincian perubahan pada kegiatan:
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN karena ada Penyesuaian gaji PNS
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan karena ada kenaikan harga surat kabar.
 - c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya karena ada Belanja Hibah Camera, Pembelian I Phone, Pembelian Apple Macbook Pro guna pembuatan aplikasi layanan daerah berbasis IOS (I Phone) saat ini yang segera untuk pengembangan aplikasi Kudus Sehat.
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor karena ada Belanja Langganan Lisensi Office dan kekurangan pembayaran internet serta Kekurangan atas kenaikan honor, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Kontrak.
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya karena ada kelebihan jumlah unit roda empat dan Kekurangan belanja servis/perbaiki laptop.
 - f. Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota karena ada Pembelian kabel FO 24 core 300 meter, Jasa splicing (perangkat outdoor) Fiber Optic.

- g. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN karena ada penambahan pegawai P3K.
 - h. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan karena ada pergeseran belanja sosialisasi tatap muka ke belanja publikasi.
 - i. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Pergeseran antar rincian belanja.
 - j. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik karena ada penambahan belanja listrik.
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik, dengan anggaran semula Rp. 9.168.831.000 menjadi Rp. 7.325.658.000, dengan rincian perubahan pada kegiatan:
- a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Diseminasi Informasi karena ada Pengurangan belanja iklan.
3. Program Aplikasi Informatika dengan anggaran semula Rp. 835.473.100 menjadi Rp. 810.673.800, dengan rincian perubahan pada kegiatan:
- a. Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota karena ada Pembelian kabel FO 24 core 300 meter, Jasa splicing (perangkat outdoor) Fiber Optic.
4. Program Penyelenggaraan statistik sektoral tidak mengalami perubahan anggaran
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi tidak mengalami perubahan anggaran.

Rencana Perubahan Renja PD dalam upaya mencapai target IKU sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 10

Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 10) tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus dan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Dokumen renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dalam Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Rumusan IKU	Target Awal 2024	Target Perubahan	Keterangan
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,23	4,23	
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	93,84	93,84	
3	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	82,4	82,4	

Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat dijelaskan bahwa tidak ada perubahan IKU dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan IKU sampai pada akhir Tahun 2025 adalah :

1. Mengoptimalkan pegawai dan sarana prasarana yang ada.
2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk menunjang keberhasilan target kinerja yang sudah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan target-target pembangunan daerah di atas serta untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran, maka dilaksanakan perubahan, pergeseran alokasi anggaran kegiatan melalui Perubahan APBD Tahun 2025 dengan memperhatikan sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2025, urgensi kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran. Rencana Perubahan Renja PD dalam upaya mencapai target indikator sebagaimana tertuang dalam Dokumen renstra Dinas Kominfo dan RPD urusan Kominfo, Statistik dan Persandian sebagaimana tertera dalam Tabel 3.3 di bawah ini :

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. KUDUS
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																			28.514.620.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.504.589.100,00	19.782.998.100,00	17.492.090.300,00	1.987.501.200,00								28.514.620.000,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							15.315.028.100,00	19.543.437.100,00	17.348.714.300,00	2.033.686.200,00								28.167.620.000,00		
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)				44 nilai	44 nilai	9.633.960.000,00	9.539.133.000,00	9.212.382.500,00	10.335.569.000,00								19.969.529.000,00		
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	14.561.000,00	14.510.000,00	8.795.000,00	-5.766.000,00								12.575.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	13 Dokumen	7.698.000,00	7.698.000,00	4.449.000,00	-3.249.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel				1.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	10 Laporan	793.000,00	742.000,00	371.000,00	-422.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel				5.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	6.070.000,00	6.070.000,00	3.975.000,00	-2.095.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel				5.575.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA				100 persen	100 persen	4.493.713.000,00	4.872.122.000,00	4.564.655.000,00	70.942.000,00								4.195.744.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	4.410.575.000,00	4.788.984.000,00	4.482.755.000,00	72.180.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel				4.075.744.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	72.900.000,00	72.900.000,00	72.900.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel				100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	10.238.000,00	10.238.000,00	9.000.000,00	-1.238.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset				100 persen	100 persen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		6.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			6.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun				12 persen	12 persen	592.205.000,00	492.341.000,00	470.217.000,00	-121.988.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		9.880.074.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					3 Orang	3 Orang	67.205.000,00	67.341.000,00	45.217.000,00	-21.988.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					500 Orang	200 Orang	525.000.000,00	425.000.000,00	425.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			9.730.074.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar				100 persen	100 persen	265.460.900,00	265.460.900,00	150.754.400,00	-114.706.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		260.702.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					40 Paket	6 Paket	62.601.000,00	62.601.000,00	34.373.500,00	-28.227.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			53.330.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	33.004.400,00	33.004.400,00	24.674.400,00	-8.330.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			35.362.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	6 Paket	18.049.500,00	18.049.500,00	8.604.500,00	-9.445.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			20.162.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.800.000,00	10.800.000,00	14.400.000,00	3.600.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			10.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	141.006.000,00	141.006.000,00	68.702.000,00	-72.304.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			141.048.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan				100 persen	100 persen	100.762.000,00	100.762.000,00	214.907.000,00	114.145.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		175.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	7.594.000,00	7.594.000,00	7.594.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			15.860.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	9 Unit	93.168.000,00	93.168.000,00	207.313.000,00	114.145.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			159.140.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu				100 persen	100 persen	3.895.312.100,00	3.522.076.100,00	3.544.156.100,00	-351.156.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		5.019.134.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			3.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.215.796.100,00	2.842.560.100,00	2.857.416.100,00	-358.380.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			4.105.634.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	675.516.000,00	675.516.000,00	682.740.000,00	7.224.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			910.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik				100 persen	100 persen	265.946.000,00	265.861.000,00	252.898.000,00	-13.048.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika		420.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	231.480.000,00	231.395.000,00	217.295.000,00	-14.185.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			370.821.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	34.466.000,00	34.466.000,00	35.603.000,00	1.137.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			49.179.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Publik				83 nilai	83 nilai	5.038.344.000,00	9.168.831.000,00	7.325.658.000,00	41.247.000,00							5.079.591.000,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase respon masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan				100 persen	100 persen	5.038.344.000,00	9.168.831.000,00	7.325.658.000,00	2.287.314.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Masyarakat Kabupaten Kudus		5.079.591.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dengan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				2 Laporan	1 Laporan	197.122.000,00	197.122.000,00	3.975.000,00	-193.147.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			209.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																			
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				1 Komunitas	1 Komunitas	56.100.000,00	56.100.000,00	50.000.000,00	-6.100.000,00	Kab. Kudus, Dawe, Lau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			71.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																			
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				25 Permohonan	15 Permohonan	55.874.000,00	55.874.000,00	28.356.000,00	-27.518.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			72.270.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																			
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				52 Rekomendasi	50 Rekomendasi	190.331.000,00	190.331.000,00	187.450.000,00	-2.881.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			209.550.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi																			
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				100 Persentase	100 Persentase	4.028.651.000,00	8.159.138.000,00	6.562.411.000,00	2.533.760.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			3.961.342.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																			
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				2 Media	2 Media	510.266.000,00	510.266.000,00	493.466.000,00	-16.800.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			555.929.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai SPBE domain tata kelola				3.3 nilai	4.4 nilai	642.724.100,00	835.473.100,00	810.673.800,00	2.475.775.900,00							3.118.500.000,00		
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data				96 aplikasi	96 aplikasi	642.724.100,00	835.473.100,00	810.673.800,00	167.949.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Kudus		3.118.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				1 Laporan	1 Laporan	11.346.000,00	11.346.000,00	5.300.000,00	-6.046.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			27.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional				1 Dokumen	1 Dokumen	114.987.500,00	307.736.500,00	307.736.500,00	192.749.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			198.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																		
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				2 Aplikasi	2 Aplikasi	9.980.000,00	9.980.000,00	4.664.000,00	-5.316.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				1 Aplikasi	1 Aplikasi	19.957.000,00	19.957.000,00	9.552.000,00	-10.405.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			33.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																		
			Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas				41 unit	32 unit	9.890.500,00	9.890.500,00	4.500.000,00	-5.390.500,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	470.607.400,00	470.607.400,00	476.631.400,00	6.024.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			2.530.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				1 Dokumen	1 Dokumen	5.955.700,00	5.955.700,00	2.289.900,00	-3.665.800,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							131.770.000,00	131.770.000,00	64.931.000,00	-66.839.000,00							197.000.000,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik				2,9 indeks	2,9 indeks	131.770.000,00	131.770.000,00	64.931.000,00	65.230.000,00							197.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercukupan data statistik sektoral				100 persen	100 persen	131.770.000,00	131.770.000,00	64.931.000,00	-66.839.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Kudus		197.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				180 Orang	140 Orang	47.024.000,00	47.024.000,00	25.570.000,00	-21.454.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			82.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional																		
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan				100 Persentase	100 Persentase	34.992.000,00	34.992.000,00	16.341.000,00	-18.651.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			48.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				5 Dokumen	5 Dokumen	24.957.000,00	24.957.000,00	11.850.000,00	-13.107.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			33.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar																		
			Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik				3 Dokumen	3 Dokumen	24.797.000,00	24.797.000,00	11.170.000,00	-13.627.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			33.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							57.791.000,00	107.791.000,00	78.445.000,00	20.654.000,00							150.000.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)				270 indeks	340 indeks	57.791.000,00	107.791.000,00	78.445.000,00	92.209.000,00							150.000.000,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian				56 persen	56 persen	57.791.000,00	107.791.000,00	78.445.000,00	20.654.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Kudus		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	38.097.000,00	88.097.000,00	69.095.000,00	30.998.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>				1 Laporan	1 Laporan	19.694.000,00	19.694.000,00	9.350.000,00	-10.344.000,00	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel			40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
J U M L A H									15.504.589.100,00	19.782.998.100,00	17.492.090.300,00	1.987.501.200,00								28.514.620.000,00	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Melalui Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2025 ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Kudus.

Dalam implementasi dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2025, diperlukan konsistensi dan komitmen OPD dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga tercapai sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan membutuhkan kritik, saran untuk dapat membantu penyempurnaannya di masa mendatang. Diharapkan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2025 ini dapat di laksanakan sebaik- baiknya dan pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik serta berguna untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Kudus, 5 Juni 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19740919 199303 2 002